

***Open Data Government in the 2024 Election:
Sirekap Application***

Murniyati Yanur, Erinda Alfiani Fauzi, Andi Ilmi Utami Irwan
Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Data terbuka merupakan hak semua orang dalam segala lini termasuk dalam pelaksanaan pemilu 2024. Keterbukaan data dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dibantu oleh beberapa aplikasi dan website, salah satunya adalah SIREKAP. Aplikasi SIREKAP digunakan oleh ketua dan anggota KPPS untuk memonitoring dan mengevaluasi data pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi SIREKAP berpengaruh penuh dalam mendukung Open data pada Pemilu 2024, hal ini dibuktikan dengan aplikasi secara *real time* memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pemilu 2024. Kendala yang dihadapi SIREKAP adalah terbatasnya infrastruktur teknologi dan konektivitas internet di beberapa daerah khususnya di Kalimantan Tengah yang dapat memperlambat proses rekapitulasi suara, sehingga data terlambat ditampilkan ke KPPS.

Kata kunci: Data Terbuka, Aplikasi SIREKAP, Pemilu

ABSTRACT

Open data is the right of all people in all lines including in the implementation of the 2024 election. Open data in the implementation of the 2024 election is assisted by several applications and websites, one of which is SIREKAP. The SIREKAP application is used by the head and members of the KPPS to monitor and evaluate election data in 2024. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study are that the SIREKAP application has a full effect in supporting Open data during the 2024 Election, this is evidenced by the application in real time providing the information needed in the 2024 election process. The obstacles to SIREKAP are the limited technological infrastructure and internet connectivity in several areas, especially in Central Kalimantan, which can slow down the vote recapitulation process, so that the data delayed displayed to KPPS.

Keywords: *Open Data, Application SIREKAP, Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan momen penting dalam setiap negara demokratis, di mana rakyat berhak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif atau kepala eksekutif (Pradesa, 2024). Di Indonesia, pemilihan umum diselenggarakan secara berkala sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemilihan Umum 2024 menjadi sorotan utama di tengah masyarakat Kalimantan Tengah, wilayah yang kaya akan keberagaman budaya, sumber daya alam, dan potensi pembangunan. Sebagai salah satu provinsi yang membentang luas di Pulau Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam proses demokrasi Indonesia. Di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang, Pemilihan Umum 2024 di Kalimantan Tengah menjadi momentum yang sangat dinanti untuk

menentukan arah dan masa depan provinsi ini. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam Pemilihan Umum 2024 adalah Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP). SIREKAP pemilu merupakan sistem penghitungan dan pelaporan hasil suara yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. yang tepat dan efisien dari SIREKAP menjadi kunci dalam memastikan keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Dalam konteks Kalimantan Tengah, SIREKAP pemilu menjadi sorotan utama mengingat peran pentingnya dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Melalui SIREKAP, diharapkan seluruh tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti, sehingga masyarakat dapat memilih wakil-wakilnya secara bebas dan adil.

Pada dasarnya sistem elektronik seperti SIREKAP menawarkan sejumlah potensi manfaat dalam konteks pemilu. Pertama, penggunaan SIREKAP dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penghitungan suara, mengurangi kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam proses manual. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik atau sengketa terkait hasil pemilu akibat ketidaktepatan dalam penghitungan (M. A. Fauzani, 2023). SIREKAP memiliki potensi untuk mempercepat proses pengumuman hasil pemilu. Dengan data yang tersedia secara langsung dalam bentuk digital, proses analisis dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan keadilan pemilu (Pradesa, 2024). Dalam pengamatan di Kalimantan Tengah ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan umum yang terjadi dalam aplikasi SIREKAP. Antara lain bahwa belum semua wilayah memiliki akses yang sama terkait jaringan internet atau Listrik, masih banyak wilayah yang punya *blank spot area*. Kendala yang selanjutnya adalah belum semua petugas memiliki kemampuan dalam mengelola aplikasi atau *smartphone* (Chaverlin, Liando, & Tulung, 2022). Dengan demikian, pendahuluan ini akan membahas secara lebih mendalam tentang efektivitas dari SIREKAP Pemilu 2024 di Kalimantan Tengah, menggali tantangan, peluang, dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan proses demokrasi di tingkat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi sebagai indikator utama *E-Government* (Al-Besher & Kumar, 2022; Fauzi et al., 2020; Twizeyimana & Andersson, 2019). Teknologi, Informasi dan Komunikasi atau yang biasa disebut TIK atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut *Information, Communication and Technologies (ICT)* adalah sebuah teknologi pengolahan dan untuk menyebarkan data-data menggunakan perangkat keras atau *hardware* dan perangkat lunak atau *software*, bisa juga dengan computer dan perangkat elektronik digital yang mendukung (Misbahruddin, 2014). Pemerintah menggunakan *E-Government* yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri (Fachrizal et al., 2023; Pusparani, 2023). Kualitas pelayanan publik meliputi transparansi dan kecepatan pemerintah dalam memberikan informasi kepada Masyarakat. Penggunaan ICT mampu meningkatkan proses *Open Data* kepada Masyarakat melalui aplikasi-aplikasi yang diluncurkan pemerintah.

Open data adalah sebuah hal yang mutlak di perlukan dalam tata kelola yang cerdas. *Open data* memiliki poin utama adalah penyediaan data yang bisa di andalkan oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri dalam mendukung pelaksanaan tata kelola yang cerdas. Dengan *open data* yang dapat di andalkan dalam pelayanan masyarakat akan membuat partisipasi dan kolaborasi meningkat. *Open data* juga menyediakan data tentang pemerintahan secara mutakhir, periodik dan gratis kepada masyarakat. Dengan *Open data*, transparansi dan hak dasar dalam masyarakat dalam ikut serta dalam pembangunan pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi akan lebih terwujud (Soegiono, 2017). Dengan kata lain, transparansi akan dipengaruhi oleh penerapan *Open Data* oleh pemerintah daerah dalam melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat (Anthopoulos & Janssen, 2016; Lim et al., 2018; Sáez-Martín et al., 2014; van Winden & van den Buuse, 2017).

Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Xi/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun

2020 Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan. Sirekap mempunyai 2 (dua) fungsi, pertama, digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang, dan yang kedua digunakan sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang rekapitulasi kepada publik. Melalui Sirekap *Mobile* data hasil penghitungan suara ditangkap menggunakan kamera, kemudian data tersebut dikirim ke server, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesesuaian pembacaan aplikasi dengan formulir Model C.Hasil-KWK.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan teori (Creswell, 2014) metode kualitatif melakukan pendekatan yang berupaya memperdalam pemahaman mengenai isu sosial atau manusia dengan terlebih dahulu melakukan penelaahan terhadap makna yang dibuat oleh individu atau suatu kelompok di dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, pengumpulan data juga bersifat eksploratif deskriptif, di mana pola pikir, ide, dan tema yang berlandaskan pada isu-isu sosial yang ada dijelaskan dan dijabarkan dengan baik. Metode ini sesuai digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian “mengapa” dan “bagaimana” dengan kata lain, ketika dihadapkan dengan permasalahan yang rumit atau fenomena yang tidak banyak dipahami akan memberikan pengertian yang kontekstual dan mampu mendeskripsikan permasalahan tersebut (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Open Data Government (Pemerintahan Data Terbuka) adalah kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik melalui keterbukaan data oleh pemerintah. Dalam konteks pemilu, konsep ini bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dengan menyediakan data yang mudah diakses, dapat diverifikasi, dan dapat digunakan oleh masyarakat luas. Open data dalam pemilu memiliki berbagai manfaat yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Publik, Inovasi Teknologi. *Open data* adalah poin utama

yang dilaksanakan pemerintah dalam membuka data kepada Masyarakat dalam lini apapun termasuk pada saat pemilu berlangsung. Walaupun *open data* pada aplikasi Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) hanya dikhususkan untuk petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Aplikasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) adalah sebuah sistem digital yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk mendukung proses rekapitulasi hasil pemilu secara elektronik.

Sirekap *Mobile* adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk memfasilitasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pilkada. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) untuk mengenali dan mengubah tulisan tangan pada formulir C Plano menjadi data numerik. Dengan akses melalui ponsel Android, Sirekap Mobile memungkinkan petugas KPPS untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara secara cepat dan akurat. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur verifikasi data untuk memastikan keakuratan sebelum data dikirim ke server. Hasil penghitungan suara dapat dipantau secara *real-time* oleh publik, sehingga meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pemilihan. Adapun terdapat beberapa fungsi dan kegunaan dari SIREKAP yaitu (Komisi Pemilihan Umum, diakses pada 2024):

1. Publikasi Hasil Penghitungan
Menyediakan sarana untuk publikasi hasil penghitungan suara secara cepat dan akurat.
2. Meningkatkan Transparansi
Membantu meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam proses penghitungan suara.
3. Mengurangi Kesalahan
Meminimalisir kesalahan dalam entri data dan mempermudah proses rekapitulasi di berbagai tingkat.
4. Kemudahan Akses
Memudahkan petugas KPPS dalam mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS melalui ponsel Android.
5. Verifikasi Data

Memungkinkan petugas KPPS untuk memverifikasi hasil penghitungan suara untuk memastikan akurasi data.

6. Informasi *Real-Time*

Menyediakan hasil penghitungan suara yang dapat dilihat oleh publik secara *real-time*.

Sirekap terdiri dari dua jenis aplikasi, yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Sirekap Mobile digunakan untuk beberapa keperluan, seperti mengambil foto, mengirim, dan memverifikasi kesesuaian pembacaan data dengan formulir Model C. Hasil KWK. Aplikasi ini juga berfungsi untuk menghasilkan salinan digital dari formulir Model C. Hasil KWK yang akan disampaikan kepada PPS dan KPU Kabupaten/Kota, serta menghasilkan data penghitungan suara di tingkat TPS yang digunakan untuk publikasi hasil hitung cepat oleh KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu, Sirekap Web digunakan untuk mendukung proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Aplikasi ini juga memantau data rekapitulasi hasil penghitungan suara pada berbagai tingkat tersebut, menghasilkan formulir Model D. Hasil untuk tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, serta mencatat sengketa dan hasilnya. Penggunaan aplikasi Sirekap memerlukan beberapa persyaratan, yakni Sumber Daya Manusia, perlengkapan, dan formulir.

Gambar 1. Formulir C hasil PILPRES, PILEG DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.





(Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2024)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan analisis terkait aspek tersebut, ditemukan bahwa aplikasi SIREKAP memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung kinerja ketua dan anggota KPPS pada berbagai tahapan penyelenggaraan Pemilu. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan sarana publikasi hasil penghitungan suara secara cepat dan akurat, sehingga mendukung peningkatan transparansi dalam proses penghitungan suara. Selain itu, aplikasi ini meminimalkan potensi kesalahan dalam entri data dan mempermudah proses rekapitulasi di berbagai tingkat. Dengan fitur kemudahan akses, ketua dan anggota KPPS dapat mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS menggunakan perangkat berbasis Android. Aplikasi ini juga memungkinkan verifikasi data secara langsung, sehingga memastikan keakuratan informasi sebelum diproses lebih lanjut. Lebih jauh lagi, SIREKAP memberikan akses informasi hasil penghitungan suara secara *real-time* yang dapat diakses oleh publik, sehingga mendukung prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi dalam proses *open data* pada penerapan SIREKAP antara lain adalah terbatasnya infrastruktur teknologi dan konektivitas internet di beberapa daerah, terutama di Kalimantan Tengah, yang dapat memperlambat proses rekapitulasi suara. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan keterampilan dan pemahaman petugas pemilu terkait cara mengoperasikan SIREKAP dengan efektif. Tak kalah penting, perlindungan yang lebih baik terhadap keamanan data dan privasi pemilih juga harus diperhatikan agar sistem ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. SIREKAP memiliki beberapa factor penghambat pertama terkait teknis penerapan SIREKAP di petugas KPPS di daerah pelaksanaan Pilkada. Kedua, juga banyak terjadi kesalahan input data

formulir C1 dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketiga, banyak daerah yang masih belum mempunyai akses internet. Keempat, menurut pengalaman dari para petugas yang mengakses SIREKAP kendala lain yang dialami adalah terjadi sistem SIREKAP eror karena terlalu banyak yang mengakses sehingga kendala tersebut membuat keterlambatan dalam proses rekapitulasi data. Dari beberapa faktor penghambat tersebut maka tantangan dari penerapan SIREKAP adalah koneksi internet, potensi serangan siber terhadap sistem dapat memengaruhi integritas data, dibutuhkan pelatihan yang intensif bagi petugas untuk memastikan penggunaan aplikasi dengan benar, keandalan teknologi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, penggunaan SIREKAP telah membawa dampak positif dalam pemilu 2024. Aplikasi SIREKAP dapat membantu meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses pemilu. Hal tersebut merupakan dampak dari penerapan *open data* pada pemilu 2024. Penggunaan SIREKAP membuat penghitungan suara menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi kemungkinan kecurangan, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi pemilih untuk memantau hasil pemilu secara *real-time*. Meskipun tidak dipungkiri masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan *open data* dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Besher, A., & Kumar, K. (2022). Use of artificial intelligence to enhance e-government services. *Measurement: Sensors*, 24. <https://doi.org/10.1016/j.measen.2022.100484>
- Anthopoulos, L., & Janssen, M. (2016). *A Unified Smart City Model (USCM) for Smart City Conceptualization and A Unified Smart City Model (USCM) for smart city Conceptualization and Benchmarking*. 12(July). <https://doi.org/10.4018/IJEGR.2016040105>
- Chaverlin, H., Liando, D. M., & Tulung, T. E. (2022). Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020. *Jurnal Governance*, 2(1),

1-10.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/39853>

Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed., Vol. 1)*. Sage Publication.

Fachrizal, M. R., Chandra Wibawa, J., Fauzan, R., & Radliya, N. R. (2023). Aplikasi Pendukung Pelayanan Publik Berbasis Mobile Dalam Mendukung Penerapan E-Government Pada Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 21(1), 21–28. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jurnal-unikom/article/download/10686/3874>

Fauzi, E. A., Nurmandi, A., & Pribadi, U. (2020). Literature Review: Smart City and Smart Governance in Analysis. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 8(1), 84–89. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i1.3304>

Fauziah, Azkiyah Rahmita, Et Al. 2023. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi*. 51-75. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JKK/article/view/39022>

Fazira, Wan. 2022. *Dampak Aplikasi SIREKAP Dalam Pilkada 2020 Kota Tanjungbalai*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/16583/1/COVER%20WAN%20FAZIRA-1.pdf>

Gauru, Christiana Cristin, Rina Martini, And Laila Kholid Alfirdaus. 2022. "Implementasi SIREKAP Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang." *Reformasi*. 224-230.

Hidayat, Fadlan Iman. *Efektivitas Organisasi Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2022.

Hadyatama, Fachrel. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIREKAP Dalam Pengiriman Hasil Perhitungan Suara Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera

Barat." *Journal Of Policy, Governance, Development And Empowerment* 2.3 (2022): 275-281.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Xi/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum. (diakses pada 2024). Retrieved from <https://sirekap-tutorial.kpu.go.id/#pendahuluan>

Lim, C., Kim, K. J., & Maglio, P. P. (2018). Smart cities with big data: Reference models, challenges, and considerations. *Cities*, 82(April), 86–99. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.04.011>

M. A. Fauzani, A. B. (2023). Probabilitas Penerapan dan Konsep Hybrid e-voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024* (pp. 79-93). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Misbahrudin, A. (2014). PEMANFAATAN TEKNOLOGI I NFORMASI DAN K OMUNIKASI (TIK) OLEH RUMAH T ANGGA UNTUK K EHIDUPAN S EHARI - HARI. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 18(1), 1–16.

Nurkamiden, Mario. "SIREKAP: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia." *Sosiologi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2 (2024): 101-110.

Pakamase, Oktari. *Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Dumai*. Diss. Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Pradesa, I. A. (2024, Maret 14). Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 1(1), 47-57.

Pusparani, M. (2023). Efektivitas E-Government Aplikasi Simpus Pada Puskesmas Paseh Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2).

Sáez-Martín, A., Haro-de-Rosario, A., & Caba-Perez, C. (2014). A vision of social media in the Spanish smartest cities. *Transforming Government: People,*

Process and Policy, 8(4), 521–544. <https://doi.org/10.1108/TG-03-2014-0010>

Soegiono, A. N. (2017). Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data. *Integritas*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.98>

Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – A literature review. In *Government Information Quarterly* (Vol. 36, Issue 2, pp. 167–178). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>

Van Winden, W., & van den Buuse, D. (2017). Smart City Pilot Projects: Exploring the Dimensions and Conditions of Scaling Up. *Journal of Urban Technology*, 24(4), 51–72. <https://doi.org/10.1080/10630732.2017.1348884>

Wulandari, Mita Suci. *Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Untuk Mendorong Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Yang Lebih Berintegritas*. Diss. Master Program In Political Science, 2023.